



## APBD Denpasar Dirancang Rp 1,8 Triliun Lebih

DENPASAR, NusaBali

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2015 dirancang Rp 1,8 triliun lebih. Mengalami peningkatan sebesar Rp 79,88 miliar lebih dibandingkan anggaran induk hanya sebesar Rp 1,72 triliun lebih. Hal tersebut dikemukakan Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra saat menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015, dalam rapat Paripurna DPRD Kota Denpasar, Rabu (29/7).

Lebih lanjut Walikota menjelaskan, sejumlah pos pendapatan daerah juga mengalami peningkatan. Pendapatan Asli Daerah dirancang meningkat Rp 38,23 miliar lebih dari anggaran Induk Rp 681,25 miliar lebih menjadi Rp 719 miliar lebih. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus juga dirancang meningkat sebesar Rp 8,62 miliar lebih dari anggaran induk sebesar Rp 702,30 miliar lebih. Dengan demikian target dana perimbangan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 710,92 miliar lebih.

Dari sisi pengeluaran terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp 2,02 triliun lebih lebih meningkat Rp 262,20 miliar lebih dibandingkan anggaran induk sebesar Rp 1,76 triliun lebih.

Walikota Rai Mantra juga menjelaskan belanja tidak langsung tersebut tidak hanya untuk belanja pegawai saja, tetapi juga untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan seperti belanja hibah kepada masyarakat, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga.

Untuk rincian belanja langsung



WALIKOTA IB Rai Mantra salami anggota dewan usai rapat paripurna, kemarin. • IST

terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dirancang sebesar Rp 1,18 triliun lebih. Mengalami peningkatan sebesar Rp 163,70 miliar lebih dibandingkan anggaran induk hanya Rp 1,01 triliun lebih. Sedangkan belanja pegawai dirancang sebesar Rp 880,09 miliar lebih meningkat sebesar Rp 50,03 miliar lebih dari anggaran induk sebesar Rp 830,05 miliar lebih. Peningkatan belanja pegawai tersebut sebagian besar untuk belanja tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD.

Walikota Rai Mantra juga menyampaikan belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat dirancang meningkat sebesar Rp 28,96 miliar lebih. Dari anggaran induk sebesar Rp 72,36 milyar lebih menjadi 101,33 milyar lebih. Demikian juga untuk bantuan sosial dalam RAPBD perubahan ini dirancang meningkat dari anggaran induk sebesar Rp 2,67 miliar lebih menjadi Rp 3,27 miliar lebih pada anggaran perubahan. "Intinya bagaimana alokasi anggaran dalam APBD Perubahan tahun ini kami pergunakan lebih banyak untuk program-program pembangunan yang pro rakyat," pungkas Rai Mantra. @

Edisi : Kamis, 30 Juli 2015

Hal : 3



## Bappeda Gerah dengan Pernyataan Diskop dan UKM Karangasem ✓

### ★ Soal Dana Operasional Dipangkas

AMLAPURA, Nu-  
saBali

Kepala Bappeda Karangasem I Ketut Sedana Mertha mengaku tersinggung atas sikap Kadis Koperasi dan UKM I Nengah Mindra, terkait realisasi anggaran di APBD 2015. Dalam pernyataannya Mindra menyebutkan, sebelum menyusun draf APBD 2015, sempat mengusulkan anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM) Rp 30 juta, ternyata terpangkas tinggal Rp 1,9 juta.

Sedana Mertha membantah pernyataan Mindra dengan bukti yang terealisasi di APBD 2015. Sehingga antara pernyataan dengan realisasi di APBD bertentangan. Sedana Mertha membeberkan hal itu di Amlapura, Rabu (29/7). Dalam pernyataan sebelumnya, Rabu (22/7) Mindra menyebutkan, dana bahan bakar minyak di tahun 2015, Rp 1,9 juta, hanya cukup untuk seminggu di saat musim RAT (rapat anggota tahunan) Koperasi dan LPD. Sedangkan di kantornya, ada tiga kendaraan roda empat dan 11 sepeda motor. Kendaraan roda empat untuk Kadis Koperasi, Isuzu Panther DK 33 S, koplingnya rusak, moil rakitan tahun 2005 tersebut, masih masuk bengkel.

Sedangkan Suzuki Escudo DK 1232 S untuk Sekretaris Dinas Koperasi, kondisi tidak layak pakai. Begitu juga Suzuki carry DK 1606 S, dalam kondisi kero, pos. Sedangkan 11 sepeda motor yang selama ini untuk pembinaan di 322 Koperasi dan 190 LPD se-



• NUSABALI/NANTRA  
I Ketut Sedana Mertha

Karangasem telah lama masuk gudang. Sehingga terancam mandeg melakukan pembinaan.

Sedana Mertha pun kemarin membantah pernyataan Mindra. "Ini buktinya, di APBD 2015 ada dana Rp 70 juta untuk bahan bakar minyak di Dinas Koperasi dan UKM,

berarti usulannya di atas itu. Bagaimana mungkin di salah satu SKPD belanja BBM setahun hanya Rp 1,9 juta, tidak masuk akal. Sebenarnya kami enggan berpolemik, hanya meluruskan," kata Sedana Mertha.

Di samping itu kata Sedana Mertha ada dana biaya mengurus STNK untuk empat unit kendaraan roda empat Rp 6 juta, dan 14 unit sepeda motor Rp 21 juta. Untuk penggantian suku cadang Rp 45 juta, dan biaya perawatan kendaraan bermotor Rp 187 juta. "Kalau mengatakan sepeda motor masuk gudang lalu biaya perawatannya habis terpakai, lalu bagaimana pertanggungjawabannya. Kan nanti bisa jadi temuan, sebaiknya berkoordinasi dulu, jangan langsung memberikan pernyataan ke publik," pinta Sedana Mertha.

Mengenai usulan dana perencanaan membangun gedung berlantai III Rp 500 juta, di APBD Perubahan 2015, dari Dinas Koperasi dan UKM, kata Sedana Mertha, memang lagi tidak ada anggaran. "Kami mengurus usulan semua SKPD. Sebelum masuk ke draf APBD mesti menggelar rapat melibatkan TAPD (Tim Anggaran Pendapatan Daerah)," lanjutnya. k16

Edisi : KEMIS, 30 Juli 2015

Hal : 8



## Dugaan Korupsi PD Parkir Kota Denpasar Diperiksa, Kadispenda Ngaku Tidak Tahu

DENPASAR, NusaBali

Sesuai jadwal, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Denpasar, Dewa Nyoman Semadi pada, Rabu (29/7) terkait dugaan korupsi di PD Parkir Kota Denpasar. Namun tidak banyak keterangan yang diperoleh karena pengelolaan PD Parkir tidak bersentuhan langsung dengan Dispenda.

Pejabat yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Kadispenda ini datang ke Kejari Denpasar pada, Rabu siang sekitar pukul 13.30 Wita. Dewa Nyoman Semadi langsung diperiksa penyidik selama satu jam hingga pukul 14.30 Wita. Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir membenarkan pemeriksaan ini. "Ya. Tadi sudah kami periksa," jelasnya saat ditemui di ruangannya.

Ia mengatakan dalam pemeriksaan tidak banyak keterangan yang diperoleh dari Kadispenda Kota Denpasar, Semadi. Pasalnya, saat ditanyakan terkait pengelolaan parkir selama ini, Semadi mengaku tidak banyak tahu. "Dia tidak tahu. Karena pengelolaan keuangan PD Parkir langsung masuk ke Bagian Keuangan Pemkot. Tidak melalui Dispenda," tegasnya.

Syahrir mengatakan pihaknya masih akan melanjutkan penyelidikan terkait kasus PD Parkir

yang disebutnya sudah menemui titik terang. Beberapa saksi lainnya juga akan diperiksa dalam kasus ini termasuk nantinya audit yang akan dilakukan oleh BPKP Wilayah Bali.

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Kadispenda, penyidik juga sudah memeriksa Sekretaris Kota (Sekkot) Denpasar, AA Rai Iswara. Kajari Denpasar, Imanuel Zebua yang sempat ditemui beberapa waktu lalu mengatakan Rai Iswara diperiksa terkait Perda, MoU antara Pemkot Denpasar dan PD Parkir serta penggunaan rekening serta aturan-aturan lainnya dalam pengelolaan parkir. "Saya minta ketegasan kepada Sekkot sebagai eksekutif apakah penggunaan rekening ini sudah benar, apakah MoU sudah benar juga soal Perda. Jawabannya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh dan ada juga yang dijawab tidak tahu," jelasnya saat itu.

Saat didesak terkait kesimpulan pemeriksaan Rai Iswara, dijelaskannya kebanyakan yang tidak benar alias banyak menyalahi aturan. Pasalnya, dalam pengelolaan PD Parkir itu harusnya ada Perda Pajak Parkir. "Terutama untuk parkir pelataran yang belum ada aturannya. Karena menurut Pak Sekda harus ada Perda yang mengaturnya," beber Zebua. rez

Edisi : Kamis, 30 Juli 2015

Hal : 5



Dugaan Korupsi Pipanisasi Karangasem

## Mantan PPTK Dituntut 2 Tahun Penjara

DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsi pipanisasi dengan terdakwa Ida Bagus Made Oka yang merupakan mantan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) akhirnya dituntut 2 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Rabu (29/7).

Dalam amar tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Putu Gede Juliansana dinyatakan jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana yang telah diubah dan ditambah menjadi UU nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sebelum membacakan tuntutan, JPU membacakan hal

memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara pertimbangan meringankan terdakwa bersifat kooperatif, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga.

"Memohon majelis hakim agar menjatuhkan pidana pada terdakwa selama 2 tahun. Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan," jelas JPU dalam amar tuntutannya di hadapan majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi.

Usai tuntutan, IB Oka melalui kuasa hukumnya Nyoman Sukardana dan Hidayat menyatakan akan melakukan pledoi (pembelaan) dalam sidang selanjutnya yang dijadwalkan pada, Rabu (5/8) mendatang.

"Kami minta waktu satu

minggu untuk menyiapkan pledoi," ujar kuasa hukum IB Oka. Dalam dakwaan dijelaskan terdakwa IB Made Oka asal Banjar Brahma,

Sibetan, Bebandem, Karangasem ini awalnya ditunjuk oleh Bupati Karangasem, Wayan Geredeg pada 2008 sebagai PPTK dalam proyek pengadaan konstruksi air bersih dan pengembangan air minum di Karangasem.

Dalam proyek yang akan memasang pipa untuk mengaliri air di empat kecamatan sepanjang 62 kilometer ini diikuti 16 peserta lelang dengan 13 perusahaan yang langsung mengajukan penawaran. Saat itu, penawaran terendah dilakukan PT Waskita Karya bekerjasama dengan PT Duta Karya dengan nilai penawaran Rp 26,4 miliar. Sementara PT Adhi Karya menawar Rp 27 miliar. Namun saat itu PT Adhi Karya

2008 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu terdakwa juga mendatangi surat permintaan pembayaran (SPP) atas proyek yang tidak sesuai spesifikasi tersebut. Hasil pemeriksaan ahli ITB, bahwa yang terpasang di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi perjanjian kerja.

Sementara itu, dari hasil perhitungan BPKP Wilayah Bali disebutkan ada kerugian Rp 3,7 miliar dalam kasus ini. Dengan rincian, pembayaran pipa giv tahun 2009 Rp 9,5 miliar lebih ditambah pembayaran pengadaan pipa giv tahun 2010, yaitu Rp 365 juta. Total pembayaran Rp 9,8 miliar. Namun hasil perhitungan, nilai barang yang diterima adalah Rp 5,8 miliar dan biaya ongkos angkut Rp 307 juta sehingga total Rp 6,1 miliar. **rez**

yang dimenangkan dan PT Waskita Karya dijadikan cadangan.

Setelah membuat perjanjian yang ditandatangani Kadis PU, Arnawa dengan Kepala Divisi VII PT Adhi Karya, Imam Wijaya Santosa (tersangka dalam berkas terpisah), proyek yang melintas di empat kecamatan, yaitu Karangasem, Abang, Kubu dan Manggis itu dimulai.

Dalam pemasangan pipa inilah akhirnya ditemukan penyelewengan. Pasalnya, PT Adhi Karya menggunakan pipa yang tidak sesuai dengan kontrak. Namun terdakwa menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut, yakni PT Adhi Karya yang juga disetujui konsultan pengawas CV Tri Mata Design. Padahal bahannya tidak sesuai dengan perjanjian dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

Edisi : Kamis, 30 Juli 2015

Hal : 5



## Empat Fraksi DPRD Badung Terima Penjelasan Bupati



KETUA DPRD Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan pandangan umum fraksi terkait penjelasan Bupati Badung AA Gde Agung terhadap enam Ranperda.

MANGUPURA, NusaBali

DPRD Badung menggelar sidang paripurna membahas pandangan umum fraksi terkait penjelasan Bupati Badung AA Gde Agung terhadap enam Ranperda, Rabu (29/7). Sidang dipimpin Ketua DPRD I Nyoman Giri Prasta bersama wakilnya I Ketut Suiasa dan I Made Sunarta. Rapat juga dihadiri Bupati Badung AA Gde Agung bersama Wakil Bupati I Made Sudiana.

Empat fraksi di DPRD Badung memberikan beberapa koreksi serta saran atas enam Ranperda, yakni Ranperda Kebijakan Umum APBD (KUA) 2016, Ranperda Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2016, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014, Ranperda tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD 2015, Ranperda PPAS Perubahan APBD 2015,

dan Ranperda tentang Perubahan APBD Badung Tahun 2015.

Fraksi PDIP dalam pandangan umum yang dibacakan oleh Ketua Fraksi I Gusti Anom Gumanti menyetujui keenam ranperda untuk disahkan menjadi perda. Satu yang menonjol, fraksi ini memberikan apresiasi kepada Bupati Badung karena dalam menyusun dokumen anggaran daerah tahun 2016 maupun APBD perubahan 2015, mencermati perkembangan dan dinamika perekonomian global. "Ini akan sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi perekonomian nasional maupun daerah," tegasnya.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya I Wayan Suyasa menyatakan makin tinggi capaian APBD akan berbanding positif dengan menurunnya angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, makin

cerdasnya rakyat, dan makin membanggakan derajat kesehatan masyarakat Badung sehingga indeks pembangunan manusia makin baik.

Menurut catatan, belanja daerah pada 2016 dirancang Rp 3,59 triliun. Belanja tidak langsung dirancang Rp 2,07 triliun dan belanja langsung dirancang Rp 1,52 triliun. "Pembiayaan daerah dirancang Rp 4,8 miliar," tegasnya.

Karena itu, Fraksi Golkar bisa menerima ranperda yang diajukan tersebut menjadi perda.

Fraksi Demokrat dengan juru bicara I Nyoman Oka Widyanta menyarankan agar masing-masing SKPD sebagai pengguna anggaran mengalokasikan anggaran secara transparan dan akuntabel, sehingga pembiayaan program dapat dilaksanakan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Badung.

Satu catatan fraksi ini terkait dengan silpa yang cukup tinggi mencapai Rp 198 miliar. "Ke depan, perencanaan anggaran perlu lebih matang dan akurat walaupun disadari silpa bukan semata-mata karena salah perencanaan, tetapi dapat juga karena efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan yang signifikan," katanya.

Pandangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh I Nyoman Sentana menyorot soal penyisihan PAD dari sektor pariwisata kepada sejumlah kabupaten, menurutnya Fraksi Gerindra belum pernah memperoleh pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. "Sebagaimana layaknya pemilik dana walaupun bukan pengguna sangat patut dan wajar mengetahui penggunaannya," ucapnya. @ as

Edisi : Kamis, 30 Juli 2015

Hal : 2



## Inspektorat Dalami Kasus Proyek Kantor Desa Delod Peken

TABANAN, NusaBali

Inspektorat Tabanan tengah melakukan pembinaan dan mendalami proyek pembangunan kantor Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan. Pembinaan dilakukan atas permintaan Desa Delod Peken yang berkirim surat ke Bupati Tabanan melalui Setda yang didisposisi kepada Inspektorat. Surat permohonan pembinaan disampaikan pada Rabu (8/7).

Kepala Inspektorat Tabanan, Gede Urip Gunawan ditemani ketua Tim Inspektorat I Gusti Nyoman Susila mengatakan telah bentuk tim pada Rabu (22/7) untuk menangani kisruh proyek pembangunan kantor Desa Delod Peken. Inspektorat telah berkoordinasi dan mendatangi pegawai Desa Delod Peken untuk meminta dokumen-dokumen terkait pembangunan untuk diperiksa. Hanya saja dokumen yang dibutuh-

kan itu baru diberikan pihak desa, Senin (27/7).

"Kami sedang dalami, belum bisa disimpulkan apa hasilnya, pemeriksaan itu kan tidak bisa dilakukan sehari dua hari," alih Urip Gunawan, Rabu (29/7). Ia mengatakan memiliki SOP selama 19 hari kerja untuk mengungkap kesimpulan terkait proyek pembangunan Kantor Desa di Delod Peken. Inspektorat meminta bukti dokumen yang asli untuk diperiksa diuji serta bukti fisik yang terpasang akan dicocokkan dengan bukti nota belanja.

Sementara Perbekel Desa Delod Peken Komang Gede Restan Wisnawa belum bisa dikonfirmasi. Saat didatangi ke kantornya ia mengaku sedang menerima banyak tamu dan menyuruh datang besok. Sedangkan salah satu pegawai Desa Delod Peken yang ditemui di kantor Inspektorat, Rabu (29/7) kemarin

yang tak mau disebutkan nama dan jabatannya mengatakan bahwa dirinya tidak berani memberikan keterangan banyak karena belum seijin Perbekel. Namun pihaknya mengklarifikasi soal telatnya pihak desa memberikan dokumen ke Inspektorat yang diminta pada Rabu (22/7) lalu hingga batas waktu Kamis (23/7).

Dikatakan pihaknya baru bisa memberikan dokumen pada Senin (27/7) disebabkan karena semua dokumen penting disimpan di lemari yang kuncinya dipegang olehnya. Saat itu ia izin tidak masuk kantor selama 2 hari karena ada odalan.

"Waktu inspektorat turun saya sedang ada odalan dan ngayah, baru hari minggu diberitahukan oleh Perbekel, dan Senin saya langsung serahkan. Kami tidak tertutup, kami terbuka," katanya. Diklarifikasi pula



KANTOR Perbekel Delod Peken Tabanan.

soal pihak desa tak mau memberikan data-data ke Kejari.

"Kami ada dokumennya, tapi untuk memberikan data dan dokumen kan harus berkordinasi dulu, tidak bisa diberikan sembarangan.

Ada undang-undangnya tidak bisa sembarangan memberikan data," ucapnya. Selain itu ia juga membenarkan bahwa hari ini Perbekel Delod Peken sedang ada tamu dan rapat. **cr55**

Edisi : Kamis, 30 Juli 2015

Hal : 7